

INDONESIA DAN KEKUATAN MARITIM

Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Disampaikan pada Intermediate Training Tingkat Nasional

HMI Cabang Kutai Kartanegara

Tenggarong Seberang, 01 Juli 2019

NENEK MOYANGKU ORANG PELAUT

(ibu sud)

- Lagu tersebut mengandung makna dan fakta sejarah penting bangsa Indonesia (nusantara pada masa sebelum kemerdekaan).
- Sejarah mengenai hubungan antara bangsa/manusia Indonesia dan alam laut yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup orang-orang pada masa itu.
- fakta dalam sebuah lagu yang sarat makna historis dan kejayaan.

- **Nenek Moyangku Orang Pelaut**
- Kejayaan Maritim Sriwijaya, Majapahit, Demak Aceh, Ternate Tidore, Buton, Gowa Tallo, Bone, Cirebon, Bugis, Makassar, Maluku
 - **Deklarasi Juanda (13 Desember 1957)**
 - Deklarasi Landas Kontinen RI (17 Februari 1969)
 - **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (21 Maret 1980)**
- The United Nations Convention on The Law of The Sea-UNCLOS III-UNCLOS 1982 (Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985)
- **2/3 wilayah NKRI adalah perairan dengan jumlah pulau-pulau yang mencapai 17 ribu**
 - Indonesia adalah negara maritim

INDONESIA HARI INI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (*air space*), duapertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), struktur pulau-pulainya tersebar luas dalam jumlah lebih dari 17.508 buah pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km. Kurang lebih 6 juta km² wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah.

INDONESIA HARI INI

- **Potensi Geografis**
- **Potensi Sumber Daya Laut**
- **Potensi Industri Pelayaran Niaga**
- **Potensi Industri Pelayaran Rakyat**
- **Potensi Industri Perkapalan dan Galangan Kapal**

(Kompas, “Menegakkan Poros Maritim Dunia”, 28 November 2014, hlm 53)

Potensi ekonomi kelautan mencapai Rp.3000 Triliun yang terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, sumber daya alam non-konvensional

POTENSI BESAR TERSEBUT TAMPAK BELUM MAKSIMAL UNTUK MEMBAWA INDONESIA PADA TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG DIHARAPKAN

MASALAH KESALAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

- **Kekurangpahaman atau minimnya kesadaran ruang dari para pemangku kepentingan**
- ***Miss oriented* dalam pembangunan di Indonesia**
- ***Land base Oriented* (melawan takdir sebagai negara maritime)**

MASALAH HUKUM

- **Aturan Belum Harmonis**
- **Banyaknya Lembaga/Kementerian/Badan/instansi yang berwenang di laut**
- **Pelanggaran dan penegakan hukum yang belum maksimal**

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

- Diawali dengan perubahan paradigma pembangunan dari *inward looking* menjadi *outward looking* (UU Nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025)
- Nawa Cita Pertama dan bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia"

5 Pilar Poros Maritim Dunia:

1. Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut
3. Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim
4. Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak semua mitra-mitranya untuk bekerjasama di bidang kelautan
5. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera. Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional" yang dijabarkan dalam 3 (tiga) pilar misi yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan

STRATEGI JITU OPTIMALISASI SEKTOR MARITIM

- **PENDEKATAN POLA PIKIR**
- **PENDEKATAN EKONOMI
KESEJAHTERAAN**
- **PENDEKATAN POLITIK PERTAHANAN
DAN KEAMANAN**

PENDEKATAN POLA PIKIR

- SYUKURI DAN NIKMATI SERTA MANFAATKAN PEMBERIAN TUHAN YME TERHADAP INDONESIA, JANGAN MELAWAN TAKDIR**
- OPTIMALISASI PERUBAHAN POLA PEMBANGUNAN DARI LAND BASE ORIENTED KE ARCHIPELAGIC BASE ORIENTED**
- SADAR AKAN RUANG WILAYAH**

PENDEKATAN EKONOMI KESEJAHTERAAN

- OPTIMALISASI POTENSI KEMARITIMAN**
- DIVERSIFIKASI USAHA DAN KERJASAMA DI BIDANG KEMARITIMAN**
- MAKSIMALISASI KOORDINASI ANTAR INSTANSI VERTICAL DAN HORIZONTAL**
- MINIMALISASI EGO SEKTORAL**
- OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI**
- AFIRMATIVE ACTION TERHADAP PELAKU EKONOMI KEMARITIMAN**
- OPTIMALISASI DIPLOMASI ANTAR NEGARA**
- PERKUAT POSISI TAWAR DI ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG EKONOMI**

PENDEKATAN POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN**
- MAKSIMALISASI KOORDINASI VERTICAL DAN HORIZONTAL ANTAR INSTANSI PENEGAK HUKUM DI PERAIRAN**
- PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PENEGAKAN HUKUM**
- OPTIMALISASI DIPLOMASI ANTAR NEGARA**

Pemerintah Daerah dan Poros Maritim Dunia

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wilayah laut, baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, desentralisasi ataupun tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan

HAMBATAN

- 1. Pemindahan beberapa kewenangan bidang kelautan dan perikanan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tidak diikuti dengan segera terbitnya pengaturan level teknis**
- 2. Pemahaman hukum kewilayahan terutama hukum laut dari aparatur pemerintah daerah masih rendah**
- 3. Pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut dan pesisir yang tidak maksimal**
- 4. Penegakan hukum terhadap aktivitas illegal di laut dan pesisir menjadi persoalan yang tidak terpisahkan dari belum maksimalnya pengawasan**

TANTANGAN

- 1. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus berisikan orang-orang yang memiliki kesadaran ruang dan pemahaman teknis terhadap wilayah laut**
- 2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki peta jalan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya yang integral, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk harus sinkron dengan perencanaan nasional**
- 3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyediakan anggaran yang proporsional untuk pembangunan bidang kelautan dan perikanan**
- 4. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus mampu untuk berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal (termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat)**

Strategi Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah
Dalam Mendukung Terwujudnya Indoensia
Sebagai Poros Maritim Dunia

1. Strategi Membangkitkan Kembali Budaya Maritim
2. Strategi Penguatan Perangkat Daerah
(*Right Man in the Right Place*)
3. Strategi Penguatan Perencanaan
Pembangunan Berbasis Kesadaran Ruang
4. Strategi Penguatan Hukum Sesuai
Kewenangan

TERIMA KASIH

**SEMOGA
BERMANFAAT**

